



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR **26** /DPRD.LPG/13.01/2015
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi atau kekuasaan membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 / 534 /03/ 2015, tanggal 2 November 2015 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016;
 2. Surat dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung Nomor : 27 / BAPEMPERDA / 13.01 / 2015, tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penyampaian Judul Raperda Usul Inisiatif BAPEMPERDA DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/13/13.01/2015, tanggal November 2015 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi I DPRD Provinsi Lampung untuk Prolegda Tahun 2016;
 4. Surat dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor :160/30/Kom. II/13.01/2015, tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penyampaian Judul Raperda Komisi II DPRD Provinsi Lampung;
 5. Surat dari Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/Komisi III-03/13.01/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung Tahun 2016;
 6. Surat dari Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/Kom.IV-175/13.01/2015, tanggal Oktober 2015 perihal Penyampaian Judul Usulan Raperda Dalam Prolegda Tahun 2016;

7. Surat dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung Nomor : 09/Kom.V/13.01/2015, tanggal Oktober 2015 perihal Program Pembentukan peraturan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015.
- KETIGA : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 26/DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 9 November 2015.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
3.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
4.	Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
5.	Pengendalian Distribusi Gabah di Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
6.	Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).	Prakarsa Eksekutif	
7.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Prakarsa Eksekutif	
8.	Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.	Bapemperda	
9.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.	Bapemperda	
10.	Perlindungan Asas Kepemilikan Tanah.	Komisi I	
11.	Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi I	
12.	Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	Komisi II	
13.	Kemandirian Pangan	Komisi II	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 26/DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 9 November 2015.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
3.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Prakarsa Eksekutif	
4.	Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
5.	Pengendalian Distribusi Gabah di Provinsi Lampung.	Prakarsa Eksekutif	
6.	Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).	Prakarsa Eksekutif	
7.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Prakarsa Eksekutif	
8.	Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.	Bapemperda	
9.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.	Bapemperda	
10.	Perlindungan Asas Kepemilikan Tanah.	Komisi I	
11.	Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi I	
12.	Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	Komisi II	
13.	Kemandirian Pangan	Komisi II	

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Perubahan Tarif Retribusi	Komisi III	
15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Komisi III	
16	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;	Komisi IV	
17	Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Komisi IV	
18	Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung	Komisi V	
19	Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Komisi V	
20	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
21	Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
22	Pedoman Rembug Desa / Pekon / Kelurahan di Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
23	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
24	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama dan Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Sumatera Promotion Center (SPC) dan PT. Sumatera Shipping Line (SSL).	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
25	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
26	Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
27	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
28	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
29	Perlindungan Kekayaan Intelektual	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2015
30	Pemerintahan Desa	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2015
31	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2015
32	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2015
33	Pembinaan Jasa Konstruksi	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2015
34	Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2015
35	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
36	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
37	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
38	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2012
39	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.